

**ANALISIS KRITIK SOSIAL TERHADAP PERAN PEREMPUAN DALAM NOVEL
'BUMI MANUSIA' KARYA PRAMOEDYA ANANTA TOE (1890-1910)**

Winda Adelia Putri¹, Aulia Fitriany², M. Khusni Mubarak³

^{1,2,3} Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan, Universitas PGRI Delta
Sidoarjo

Alamat e-mail : ¹ Windaadelia003@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis kritik sosial terhadap peran perempuan pribumi dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer pada periode kolonial 1890-1910, mengidentifikasi bentuk kritik sosial terhadap kolonialisme dan patriarki melalui tokoh Nyai Ontosoroh, serta menganalisis dampak positif dan negatif dari perlawanannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data primer berupa kutipan dialog dan narasi novel, didukung sumber sekunder dari jurnal ilmiah dan buku sejarah. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan validasi triangulasi sumber dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel Bumi Manusia berfungsi sebagai medium kritik sosial yang kuat terhadap ketidakadilan struktural masa kolonial. Tokoh Nyai Ontosoroh merepresentasikan perempuan pribumi yang memiliki kesadaran kritis dan kemampuan resistensi di tengah penindasan berlapis akibat perpaduan patriarki Jawa dan kolonialisme Belanda. Perlawanannya berdampak positif berupa perubahan cara pandang orang-orang di sekitarnya, namun juga membawa dampak negatif berupa krisis identitas dan kegagalan sistemik yang memperlihatkan batas perlawanan individual terhadap kekuasaan kolonial yang bersifat total.

Keywords: Kritik Sosial, Peran Perempuan, Bumi Manusia, Kolonialisme, Patriarki

ABSTRAK

This study aims to analyze the social critique of the role of indigenous women in Pramoedya Ananta Toer's novel *Bumi Manusia* during the colonial period of 1890–1910, to identify forms of social critique directed at colonialism and patriarchy through the character of Nyai Ontosoroh, and to analyze the positive and negative impacts of her resistance. This study employs a descriptive-analytical qualitative method using a library research approach. Primary data consists of dialogue excerpts and narrative passages from the novel, supplemented by secondary sources from academic journals and history books. The analysis was conducted in three stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions, with validation through triangulation of sources and theory. The results of the study show that the novel *Bumi Manusia* serves as a powerful medium for social criticism of structural injustices during the colonial era. The character Nyai Ontosoroh represents an indigenous woman who possesses critical awareness and the capacity for resistance amid layered oppression resulting from the interplay of Javanese patriarchy and Dutch colonialism. Her resistance had a positive impact in the form of a shift in the perspectives of those around her, but it also had negative consequences, including an identity crisis and

systemic failures that revealed the limits of individual resistance against totalitarian colonial power.

Kata kunci: Social Criticism, Women's Roles, Bumi Manusia, Colonialism, Patriarc

A. Pendahuluan

Kritik sosial sebagai pendekatan analitis berakar dari pemikiran Marx (1867) bahwa ide-ide dominan dalam masyarakat selalu mencerminkan kepentingan kelompok berkuasa, sehingga struktur sosial bukan sesuatu yang netral melainkan produk relasi kuasa yang timpang. Gagasan ini dikembangkan Adorno (1970) yang menegaskan bahwa sastra mampu melawan ideologi dominan melalui representasi realitas yang memaksa pembaca mempertanyakan tatanan yang selama ini dianggap wajar (Fajarni, S. 2022). Kerangka ini dipadukan dengan feminisme postkolonial yang, menurut Budianta (2018), menyoroti persinggungan gender, kolonialisme, dan ras dalam pengalaman perempuan pascapenjajahan, sekaligus menjadi panggilan agar perempuan subaltern merebut narasi mereka sendiri melalui sastra dan aktivisme. Teori interseksionalitas yang diperkenalkan Crenshaw (1989) menawarkan pisau analisis yang lebih tajam untuk memahami penindasan berlapis ini,

berangkat dari pengamatannya terhadap perempuan kulit hitam di Amerika Serikat yang tidak terwakili memadai baik oleh gerakan feminis maupun gerakan hak sipil, karena keduanya hanya melihat satu sumbu penindasan secara terpisah. Mustaqim (2018) kemudian menegaskan bahwa identitas yang saling berpotongan gender, ras, dan kelas tidak dapat dipahami secara terpisah karena penindasan justru lahir dari perpotongannya. Kritik sosial menyediakan kerangka struktural untuk membaca relasi kuasa, feminisme postkolonial menyediakan perspektif subjek terjajah yang selama ini dibungkam, dan interseksionalitas menjelaskan mengapa penindasan perempuan pribumi bersifat unik dan tidak dapat direduksi pada satu faktor tunggal.

Sastra Indonesia berfungsi bukan hanya sebagai karya estetis, tetapi juga sebagai alat kritik sosial yang merekam realitas yang kerap diabaikan sejarah resmi. Pada era kolonial Hindia Belanda (1890-1910), perempuan pribumi mengalami

penindasan berlapis akibat perpaduan patriarki Jawa dan sistem kolonial diskriminatif, menempatkan mereka pada posisi paling lemah berdasarkan gender, ras, dan kelas sekaligus (Ilma, 2016). Kaymaz dan Unsal (2022) menjelaskan bahwa feminisme postkolonial memahami bagaimana kedua sistem itu saling memperkuat dalam mempertahankan penindasan perempuan, sedangkan interseksionalitas bukan sekadar alat deskriptif, melainkan kerangka analitis kritis yang menghubungkan pengalaman individu dengan struktur kekuasaan yang lebih luas.

Pramoedya Ananta Toer lahir 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Tengah, dari keluarga priyayi terpelajar. Tumbuh dalam ketimpangan kolonial, kesadaran sosialnya terasah sejak dini hingga ia bergabung dalam Revolusi Indonesia (1945-1949) dan dipenjara Belanda selama dua tahun (1947-1949), masa ketika ia mulai menulis serius. Rezim Orde Baru menangkapnya pada 1965 tanpa proses pengadilan dan membuangnya ke Pulau Buru selama sepuluh tahun (1969-1979). Dalam pembuangan itu, tanpa kertas dan pena di awal penahanan, ia menyusun Tetralogi Pulau Buru (Bumi Manusia, Anak

Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca) secara lisan kepada sesama tahanan sebelum dituliskan. Bumi Manusia, novel pertama tetralogi ini, berlatar Hindia Belanda 1890-1910 dan mengisahkan Minke, pemuda pribumi terpelajar lulusan HBS, yang jatuh cinta pada Annelies Mellema, anak Herman Mellema (Belanda) dengan Nyai Ontosoroh, perempuan pribumi berstatus selir. Di balik kisah cinta ini, novel membongkar ketidakadilan struktural kolonial, feodalisme Jawa yang mengekang perempuan, rasisme kolonial yang menihilkan hak pribumi di hadapan hukum, serta institusi nyai yang melegalkan eksploitasi seksual dan ekonomi tanpa perlindungan hukum. Tokoh Nyai Ontosoroh menjadi pusat kritik sosial novel ini bukan sebagai korban pasif, melainkan individu cerdas dan berani yang melawan sistem meski akhirnya menghadapi batas perlawanan individual terhadap kekuasaan kolonial yang total (Handayani, 2021; Arwansyah & Saputra, 2021).

Penelitian terdahulu mengenai Bumi Manusia menghasilkan temuan beragam namun parsial. Handayani (2021) menyimpulkan Nyai Ontosoroh mengalami subordinasi ganda akibat

patriarki Jawa dan hukum kolonial, tanpa mengaitkannya dengan peran sosial perempuan pribumi secara historis. Arwansyah dan Saputra (2021) menemukan marginalisasi tokoh perempuan sebagai produk sistem kolonial-patriarkal, namun berhenti pada level individu tanpa menghubungkannya dengan kritik sosial yang lebih sistemik. Herawati dkk. (2023) mengidentifikasi eksploitasi perempuan melalui praktik nyai sebagai produk struktur patriarki-kapitalis kolonial, tetapi mengabaikan dampak perlawanan tokoh secara menyeluruh. Ketiga kajian tersebut belum secara terpadu menganalisis peran sosial perempuan pribumi, bentuk kritik sosial terhadap kolonialisme dan patriarki, serta dampak perlawanan Nyai Ontosoroh dalam satu kerangka analitis yang utuh.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan berupa pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan kritik sosial, feminisme postkolonial, dan interseksionalitas dalam bingkai sosiologi sastra, sehingga Nyai Ontosoroh diposisikan bukan sekadar korban, melainkan agen kritik sosial yang aktif menantang penindasan berlapis dari berbagai arah. Kajian ini

mendesak dilakukan karena pemahaman tentang penindasan ganda perempuan pribumi periode 1890-1910 masih terfragmentasi, sementara isu tersebut tetap relevan dengan debat kesetaraan gender dan dekolonisasi pengetahuan kontemporer. Budianta (2018) menegaskan bahwa tanpa dekolonisasi gender melalui sastra, suara perempuan subaltern akan terus terpinggirkan dan potensi sastra sebagai alat dekolonisasi pengetahuan tidak dapat dimanfaatkan maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kritik sosial terhadap peran perempuan pribumi dalam Bumi Manusia, mengidentifikasi bentuk kritik terhadap kolonialisme dan patriarki melalui tokoh Nyai Ontosoroh, serta menganalisis dampak positif dan negatif perlawanannya dalam era kolonial Hindia Belanda 1890-1910.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi pustaka (library research), sehingga data dikumpulkan sepenuhnya dari sumber tertulis (Creswell, 2018; Zed, 2014).

Objek material penelitian adalah novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer, dengan objek formal berupa analisis kritik sosial terhadap peran perempuan pribumi melalui tokoh Nyai Ontosoroh.

Data primer bersumber dari kutipan teks, dialog, dan narasi novel, sedangkan data sekunder meliputi dokumentasi historis masa kolonial dari Leiden University Digital Collections, artikel ilmiah, jurnal, dan buku sejarah. Pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan intensif, identifikasi teks yang mengandung kritik sosial, dan pengklasifikasian ke dalam tiga kategori: (1) peran sosial perempuan pribumi masa kolonial (1890-1910), (2) bentuk kritik sosial terhadap kolonialisme dan patriarki, serta (3) dampak perlawanan Nyai Ontosoroh. Validitas data dijamin melalui triangulasi teori dengan menerapkan kerangka kritik sosial, feminisme postkolonial, dan interseksionalitas secara bersamaan, serta triangulasi sumber dengan membandingkan data primer novel dan data sekunder historis-akademik (Moleong, 2019). Validasi tambahan dilakukan melalui diskusi antara peneliti, dosen pembimbing, dan rekan sejawat untuk memastikan

konsistensi interpretasi sepanjang proses analisis. Analisis mengikuti tiga tahap model Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data dalam teks naratif sistematis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan tema yang ditemukan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Sosial Perempuan Pribumi (1890-1910)

Perempuan pribumi pada periode 1890-1910 menempati posisi paling rendah dalam hierarki sosial kolonial Hindia Belanda, di bawah laki-laki Eropa, perempuan Eropa, laki-laki Indo, bahkan laki-laki pribumi, hierarki ini menciptakan ketimpangan sistematis berbasis gender, ras, dan kelas ekonomi. Mereka terikat ideologi patriarki Jawa melalui konsep *konco wingking* yang mengeksklusifkan perempuan pada urusan rumah tangga. Perempuan priyayi menjalani pingitan sejak usia 12 tahun, dilarang keluar rumah tanpa didampingi suami, serta dijodohkan oleh orang tua tanpa diberi hak untuk didengar pendapatnya. Pingitan bukan sekadar norma budaya yang abstrak, melainkan pengalaman konkret yang secara harfiah mengurung tubuh dan suara perempuan sejak usia kanak-kanak.

Akses pendidikan formal bagi perempuan pribumi pada periode ini hampir tidak tersedia, sebab sekolah khusus perempuan pertama, Sekolah Istri, baru didirikan secara swadaya oleh Dewi Sartika pada 1904 dengan biaya hanya f0,50 per bulan agar dapat diakses oleh kalangan luas, jauh sebelum negara kolonial menyediakan fasilitas serupa secara resmi (Wulandari & Pratiwi, 2021). Pemerintah Hindia Belanda sendiri baru mencanangkan Politik Etis pada 1901, namun realisasinya tetap terbatas dan diarahkan untuk mencetak tenaga kerja administratif kolonial, bukan untuk membuka kesetaraan akses pendidikan secara menyeluruh bagi penduduk pribumi. Bahwa inisiatif pendidikan perempuan justru muncul dari swadaya tokoh pribumi sendiri, bukan dari kebijakan negara kolonial, memperlihatkan bahwa keterbelakangan pendidikan perempuan pribumi bukan akibat ketidakmampuan alamiah, melainkan produk dari sistem kolonial yang sengaja menunda dan membatasi akses tersebut selama puluhan tahun.



*Gambar 1. Sekolah adat di
menerima siswa laki-laki se*
*Gambar 2. Para perempuan sedang bekerja di
perkebunan karet, diduga di Jawa sekitar tahun
1910-an*

Sumber : Digital Collections
Universiteit Leiden

Bentuk eksploitasi paling sistematis adalah institusi “Nyai” perempuan pribumi yang menjadi selir laki-laki Eropa tanpa status pernikahan yang sah. Pada 1898, sekitar 5.000-7.000 perempuan berstatus nyai di Jawa dan Sumatra tanpa hak hukum atas properti, anak, maupun warisan. Kondisi ini berakar dari pembagian golongan hukum yang ditetapkan sejak berlakunya Burgerlijk Wetboek (BW) tahun 1859, yang secara tegas memisahkan golongan Eropa dari golongan pribumi dan menempatkan perempuan pribumi yang menjalin hubungan tanpa pernikahan sah berada di luar perlindungan hukum perdata Eropa sekaligus tidak diakui penuh oleh hukum adat (Muniroh et al., 2023).

Kurniawan (2014) dalam kajiannya tentang institusi nyai menjelaskan bahwa status ini muncul akibat

kelangkaan perempuan Eropa di Hindia Belanda, sehingga laki-laki Eropa memilih hidup dengan perempuan pribumi tanpa ikatan resmi karena dianggap lebih murah dan tidak mengikat secara hukum dibandingkan pernikahan. Karima (2017) menambahkan bahwa nasib seorang nyai bahkan tidak terjamin sepanjang hidupnya, sebab begitu usianya mendekati 30 tahun, ia lazim “dipensiunkan” oleh tuannya tanpa kompensasi yang layak dan kehilangan hak asuh atas anak-anaknya sendiri.

Data Volkstelling 1905 mencatat 68% perempuan pribumi bekerja di sektor pertanian dengan upah 15 sen per hari atau separuh dari upah buruh laki-laki dan Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1898 menetapkan perempuan pribumi tidak memiliki kapasitas hukum penuh sehingga 70% janda pribumi jatuh miskin setelah kematian suami (Herawati et al., 2023). Ribuan perempuan yang berada dalam status hukum ambigu tersebut, ditambah ancaman kehilangan anak dan harta di usia tua serta upah yang hanya separuh dari laki-laki, memperlihatkan bahwa penindasan yang dialami perempuan pribumi tidak berdiri pada

satu sumbu tunggal. Posisi sebagai perempuan, sebagai pribumi, dan sebagai nyai saling berpotongan dan saling memperkuat dalam menghasilkan kerentanan yang berlapis.

Perempuan pribumi tidak sepenuhnya pasif, Jaringan arisan dan gotong royong menjadi bentuk solidaritas informal untuk bertahan dari tekanan ekonomi kolonial, sementara R.A. Kartini (1879-1904) merepresentasikan kesadaran feminis poskolonial yang mengintegrasikan kritik terhadap patriarki Jawa dan rasisme kolonial (Budianta, 2018). Kesadaran kritis semacam ini kemudian berkembang menjadi pergerakan yang lebih terorganisasi, sebagaimana ditunjukkan oleh organisasi Isteri Sedar yang secara progresif menyuarakan kritiknya melalui media cetak, menolak pandangan bahwa perkawinan adalah satu-satunya tujuan hidup perempuan, dan mendesak penyediaan pendidikan serta pengajaran yang setara bagi perempuan pribumi. Kemunculan strategi bertahan semacam ini, baik melalui jaringan solidaritas informal, kesadaran kritis seperti yang ditunjukkan Kartini, maupun

pergerakan terorganisasi seperti Isteri Sedar, menjadi bukti bahwa subordinasi berlapis tidak serta-merta menghasilkan kepasifan total, melainkan juga membuka ruang resistensi bertahap di tengah struktur yang menekan dari berbagai arah sekaligus.

Bentuk-Bentuk Kritik Sosial Terhadap Kolonialisme dan Patriarki

A. Kolonialisme

Novel Bumi Manusia mengkritik kolonialisme secara berlapis melalui pengalaman Nyai Ontosoroh, yang menggambarkan tiga bentuk penindasan yang saling berkaitan, tubuh perempuan pribumi yang dijadikan obyek lewat sistem nyai, hilangnya hak hukum karena faktor ras, dan rasisme yang sudah meresap ke dalam cara berpikir dan bersikap masyarakat sehari-hari.

Bentuk pertama adalah sistem nyai sebagai bentuk perbudakan yang justru dilindungi oleh aturan yang berlaku saat itu. Pengakuan Nyai Ontosoroh bahwa dirinya "dibeli untuk dijadikan induk bagi anak-anaknya" (h. 421) menunjukkan bagaimana sistem kolonial memperlakukan perempuan pribumi seperti barang yang bisa diperjualbelikan dan hanya

berguna untuk melahirkan keturunan. Setiowati (2024) menjelaskan bahwa Pramoedya menggambarkan Nyai Ontosoroh sebagai sosok yang sadar betul akan posisinya, bukan sekadar korban yang pasrah, sehingga setiap kalimat pengakuannya sekaligus menjadi bukti penderitaan dan bentuk protes. Muniroh dkk. (2023) menambahkan bahwa pemerintah kolonial sengaja membiarkan status nyai berada dalam posisi tidak jelas, keberadaannya diakui agar bisa dimanfaatkan, tetapi tidak cukup diakui untuk mendapat perlindungan. Aturan semacam ini membuat eksploitasi bisa terus terjadi tanpa ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Penindasan ini tidak hanya soal uang atau tenaga, pergantian nama dari Sanikem menjadi Nyai Ontosoroh menandai hilangnya jati diri yang lama dan munculnya identitas baru yang dipaksakan oleh sistem. Kaymaz dan Unsal (2022) menjelaskan bahwa dalam masa kolonial, tubuh perempuan menjadi tempat di mana penjajahan dan budaya yang merendahkan perempuan saling bertemu dan saling menguatkan. Kesadaran Nyai Ontosoroh atas semua ini akhirnya meledak menjadi

protes terbuka di pengadilan (h. 427), yang menunjukkan pergeseran dari sekadar menyalahkan satu orang menjadi kritik terhadap keseluruhan sistem yang menindas.



*Gambar 3. Nyai yang diBenthem van der Bergh di
Benthem van der Bergh di Mbersama putrinya, Johanna van der Velden, dan
istrinya (Nyai) di Bandung sekitar 1900-an*

Sumber : Digital Collections
Universiteit Leiden

Bentuk kedua adalah hukum kolonial yang digunakan untuk menghapus hak-hak perempuan pribumi sebagai manusia yang setara di mata hukum. Ucapan hakim bahwa "Nyai hanya Pribumi" (h. 488) menunjukkan bahwa Nyai Ontosoroh tidak dianggap sebagai pihak yang berhak bicara di pengadilan, bahkan ketika menyangkut hak-haknya sebagai seorang ibu. Saputra (2011) menyebut situasi ini sebagai keadaan di mana suara seseorang tidak didengar bukan karena ia tidak bersuara, melainkan karena sistem memang sengaja dirancang agar

suaranya tidak dianggap sah secara hukum. Kekuasaan kolonial bahkan menjangkau dari jarak yang sangat jauh, ketika pengadilan di Amsterdam menunjuk wali untuk Annelies tanpa pernah tahu kondisi nyata kehidupan Nyai Ontosoroh. Ini membuktikan bahwa kolonialisme bukan hanya soal mengeruk keuntungan ekonomi, tapi juga soal kontrol penuh yang tidak mengenal batas wilayah. Kekalahan Nyai Ontosoroh di pengadilan tidak bisa dijelaskan oleh satu alasan saja. Ia kalah bukan semata karena ia perempuan, bukan semata karena ia pribumi, dan bukan semata karena statusnya sebagai nyai tanpa pengakuan hukum, melainkan karena ketiga hal itu saling bertumpuk dan saling memperberat satu sama lain. Hal ini sejalan dengan pemikiran Crenshaw (dalam Mustaqim, 2018) bahwa seseorang yang mengalami lebih dari satu bentuk penindasan sekaligus (misalnya karena gender dan ras secara bersamaan) merasakan beban yang berbeda dan lebih berat dibanding jika penindasan itu dialami secara terpisah. Setiowati (2024) juga mencatat bahwa Nyai Ontosoroh tidak pernah bisa benar-benar lepas dari label "nyai", sebesar apa pun kemampuannya dalam

mengelola usaha. Fairuz (2024) menambahkan bahwa tokoh ini memperlihatkan bentuk penindasan yang berlapis dan saling terkait, bukan penindasan yang berdiri sendiri-sendiri.

Bentuk ketiga adalah rasisme dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kolonial. Penghinaan "tetap monyet¹" (h. 64) menunjukkan bahwa sekeras apa pun usaha orang pribumi untuk menyesuaikan diri dengan budaya kolonial, mereka tetap dipandang tidak setara sebagai manusia. Carey dan Noor (2022) menjelaskan bahwa rasisme pada masa itu bukan sekadar prasangka pribadi orang per orang, melainkan sudah menjadi sistem yang tertanam dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan sampai aturan kerja, sehingga sangat sulit bagi orang pribumi untuk memperbaiki nasibnya. Melalui Nyai Ontosoroh, Pramoedya menempatkan penderitaan rakyat pribumi dalam konteks yang lebih luas, menegaskan bahwa apa yang terjadi di Hindia Belanda adalah bagian dari pola penjajahan yang serupa di berbagai belahan dunia.

B. Patriarki

Novel Bumi Manusia mengkritik sistem patriarki melalui tiga bentuk yang saling berkaitan, pengurungan perempuan lewat sistem pingitan dan pembungkaman suaranya, perempuan yang diperlakukan sebagai barang dalam transaksi antarlaki-laki, serta penindasan yang diturunkan dari satu generasi perempuan ke generasi berikutnya tanpa perlu dipaksakan dari luar. Ajizah (2021) menegaskan bahwa pembatasan ini bukan sekadar kebiasaan melainkan tatanan budaya yang dipertahankan secara struktural.

Bentuk pertama yang paling mendasar adalah pengurungan perempuan melalui sistem pingitan dan hilangnya hak perempuan untuk bersuara dalam keputusan yang menyangkut hidupnya sendiri. Nyai Ontosoroh menceritakan bahwa sejak usia tiga belas tahun ia mulai dipingit dan hanya mengenal dapur, ruang belakang, dan kamarnya sendiri, bahkan untuk duduk di teras rumah pun ia tidak diizinkan (h. 118). Larangan ini bukan sekadar aturan fisik biasa, melainkan menunjukkan seberapa jauh sistem patriarki tidak mengakui keberadaan perempuan di

ruang publik, hingga jejak langkahnya pun tidak boleh terlihat di sana. Israpil (2017) menjelaskan bahwa budaya patriarki secara turun-temurun menciptakan perbedaan peran dan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki menguasai seluruh ruang publik sementara perempuan dibatasi hanya pada urusan rumah tangga. Sistem pingitan adalah bentuk nyata dari pembatasan ini, bukan sekadar tradisi yang netral, melainkan cara yang sengaja digunakan untuk memutus akses perempuan terhadap pengetahuan, pergaulan, dan kebebasan menentukan diri sendiri sejak usia yang masih sangat muda.

Suara ibu juga tidak dianggap penting dalam keputusan yang menyangkut hidup anak perempuannya sendiri. Diceritakan bahwa ibu Nyai Ontosoroh tidak memiliki hak untuk bicara seperti perempuan pribumi pada umumnya, karena semua keputusan ditentukan oleh ayah, bahkan ketika sang ibu bertanya tentang menantu seperti apa yang diinginkan, pertanyaan itu tidak pernah dijawab (h. 119). Diamnya sang ayah bukan tanda ia ragu, melainkan bentuk kekuasaan yang sangat tegas, pertanyaan ibu

dianggap tidak perlu dijawab karena dianggap tidak punya hak untuk bertanya. Halizah dan Faralita (2023) menjelaskan bahwa budaya patriarki yang sudah mengakar membuat perempuan menjadi kelompok yang terpinggirkan, di mana perbedaan gender sering kali menimbulkan diskriminasi yang menempatkan perempuan di luar pengambilan keputusan, bahkan dalam hal yang paling menyangkut kehidupan mereka sendiri.

Bentuk kedua adalah perempuan yang diperlakukan sebagai barang dalam jaringan kepentingan laki-laki. Penyerahan Sanikem kepada Mellema digambarkan secara dingin, ia diserahkan kepada Mellema dengan imbalan uang dua puluh lima gulden untuk ayahnya, ditambah janji ayahnya akan diangkat menjadi kasir (h. 123). Perempuan diserahkan layaknya barang dalam transaksi bisnis, tanpa perlu kehadiran atau persetujuan dari pihak yang paling berkepentingan, yaitu dirinya sendiri. Israpil (2017) menegaskan bahwa pola semacam ini muncul dari keyakinan bahwa perempuan adalah milik laki-laki yang bisa dipindahtangankan demi kepentingan keluarga, sehingga perempuan

berfungsi bukan hanya sebagai sumber keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai modal sosial dan karier bagi laki-laki. Ayah Sanikem membuktikan hal ini secara nyata, ia tidak hanya menerima uang tetapi juga mendapat kenaikan jabatan, bukti bahwa tubuh dan masa depan anak perempuannya dianggap sebagai investasi yang paling menguntungkan baginya.

Sisi lain dari ketidakadilan ini semakin terlihat ketika Nyai Ontosoroh mempertanyakan standar ganda yang diterapkan terhadap hubungan antara perempuan dan laki-laki dari latar belakang berbeda. Ia menggugat mengapa hubungannya dengan Mellema, seorang Eropa, tidak pernah dipersoalkan, sementara hubungan anaknya dengan Minke, seorang pribumi, justru dipersoalkan (h. 426). Hal ini menunjukkan bahwa aturan patriarki tidak diterapkan secara konsisten berdasarkan nilai moral, melainkan berdasarkan kepentingan ras. Ketika perempuan pribumi diserahkan kepada laki-laki Eropa, tidak ada yang keberatan, tetapi ketika anak perempuannya menjalin hubungan dengan laki-laki pribumi, sistem hukum kolonial justru ikut campur. Crenshaw (dalam

Mustaqim, 2018) menegaskan bahwa perempuan yang mengalami lebih dari satu bentuk penindasan sekaligus tidak bisa dipahami hanya dengan melihat satu sisi saja, karena pengalaman tertindas mereka justru lahir dari gabungan berbagai bentuk penindasan itu sekaligus.

Tidak adanya perlindungan hukum bagi perempuan pribumi yang berani melawan sistem ini dipertegas lewat peringatan bahwa di depan hukum, orang pribumi yang melawan orang Eropa tidak akan pernah menang, bahkan jaksa dan hakim akan bersatu melawannya (h. 414). Kutipan ini memperlihatkan bagaimana patriarki dan kolonialisme saling mengunci dalam menutup semua jalan pembelaan bagi perempuan pribumi, ia tertekan bukan hanya oleh ketidaksetaraan gender di dalam rumah tangga, tetapi juga oleh ketidaksetaraan ras dalam sistem hukum publik. Kaymaz dan Unsal (2022) menegaskan bahwa feminisme pascakolonial hadir untuk mengungkap bagaimana kedua sistem ini tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling memperkuat sehingga perempuan pribumi tidak memiliki ruang untuk menang dari arah mana pun, baik dari dalam

keluarga maupun dari lembaga negara.

Bentuk ketiga adalah penindasan yang diwariskan antargenerasi, yang membuat patriarki tetap bertahan bukan karena dipaksakan dari luar, melainkan dilanggengkan oleh perempuan itu sendiri. Nyai Ontosoroh tidak hanya menyalahkan ayahnya yang telah menjualnya, tetapi juga ibunya yang memilih diam, dengan mengatakan bahwa ibunya tidak layak disebut ibu karena tidak mampu mempertahankannya, dan ayahnya tidak layak disebut ayah karena telah menjualnya (h. 128). Pernyataan ini menunjukkan kesadaran kritis bahwa patriarki tidak hanya dijalankan oleh laki-laki yang aktif menindas, tetapi juga ikut dilanggengkan oleh perempuan yang memilih diam menghadapi ketidakadilan. Halizah dan Faralita (2023) menjelaskan bahwa budaya patriarki yang sudah sangat mengakar membuat perempuan sendiri kerap menjadi pihak yang secara tidak sadar ikut mempertahankan sistem yang menindas mereka, karena nilai-nilai itu sudah dianggap sebagai bagian dari

identitas dan kewajiban moral mereka sendiri.

Kesadaran atas warisan penindasan ini mendorong Nyai Ontosoroh untuk secara aktif memutus rantai tersebut. Ia berjanji kepada Annelies bahwa anaknya tidak boleh diperlakukan seperti dirinya dulu, dan tidak boleh dijual oleh siapa pun dengan harga berapa pun (h. 128). Janji ini adalah keputusan sadar untuk tidak meneruskan penindasan yang ia alami, sekaligus pernyataan bahwa kebebasan bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja oleh sistem, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan, bahkan ketika seluruh keadaan justru menentangnya. Karl Marx (dalam Hendriwani, 2020) menyebut kesadaran semacam ini sebagai kesadaran kelas (*class consciousness*)², yaitu momen ketika seseorang yang tertindas mulai menyadari posisinya dalam sistem dan memilih untuk tidak lagi menerima keadaan itu begitu saja.

Bagi Nyai Ontosoroh, kepemilikan harta dan usaha menjadi satu-satunya cara untuk mempertahankan martabatnya dalam sistem kolonial, bukan karena nilai kemanusiaannya

diakui secara setara. Ia menyatakan bahwa jika gagal menyelamatkan perusahaannya, ia akan kembali direndahkan seperti nyai pada umumnya, sehingga kehormatannya hanya bisa ia dapatkan dari usahanya itu (h. 431). Pernyataan ini menyadarkan bahwa sebesar apa pun kemampuan, integritas, dan kecerdasan yang dimiliki Nyai Ontosoroh, martabatnya tetap bergantung pada hal di luar dirinya yang sewaktu-waktu bisa dirampas oleh sistem yang sama. Apriliandra dan Krisnani (2021) menjelaskan bahwa budaya patriarki yang didukung oleh struktur kekuasaan yang dikuasai laki-laki membuat perempuan selalu berada dalam posisi bergantung, baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga keberhasilan pribadi sekalipun tidak pernah cukup untuk benar-benar membebaskan perempuan dari batasan yang diciptakan sistem tersebut.

Dampak Perlawanan Nyai Ontosoroh

A. Dampak Positif

Perlawanan Nyai Ontosoroh menghasilkan dua dampak positif yang saling berkaitan: runtuhnya prasangka kolonial terhadap

kemampuan perempuan pribumi, dan keberaniannya menantang lembaga hukum tertinggi kolonial. Pengakuan Kommer bahwa kemampuan Nyai Ontosoroh sebagai pengusaha merupakan "lompatan historis... untuk seorang Pribumi" (h. 347) menunjukkan momen ketika anggapan kolonial bahwa kemampuan ekonomi hanya dimiliki ras tertentu justru dipatahkan oleh sosok yang seharusnya tidak diberi kesempatan untuk itu. Hal serupa terjadi pada Minke, yang terpaksa mengubah pandangannya setelah melihat Nyai Ontosoroh tampil "tanpa merasa rendah diri" karena ia "sadar akan kekuatan pribadinya" (h. 102). Amanda dan Lubis (2022) menegaskan bahwa sikap kritis dalam diri Nyai Ontosoroh tidak hanya ditunjukkan lewat kata-kata, tetapi lewat cara ia bersikap dan bertindak yang selalu menunjukkan kemandirian dan penguasaan diri, sehingga kehadirannya saja sudah menjadi bentuk perlawanan.

Kesadaran diri ini kemudian berkembang menjadi keberanian menantang sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu hukum kolonial. Tekadnya untuk menjadi "Pribumi pertama yang

melawan Pengadilan Putih³" meski "tanpa ahli hukum" (h. 502), serta keputusannya memaknai langkah ini sebagai sebuah kehormatan, menunjukkan perubahan posisi dari pihak yang seharusnya tunduk menjadi pihak yang menentukan sendiri makna dari tindakannya. Fairuz (2024) menjelaskan bahwa Nyai Ontosoroh menjadikan pengetahuan dan bahasa kolonial sebagai alat untuk melawan secara aktif, bukan sekadar untuk diterima oleh sistem, sehingga setiap pencapaiannya, baik dalam usaha maupun di ruang sidang, merupakan bagian dari satu strategi perlawanan yang sama.

Crenshaw (dalam Mustaqim, 2018) menegaskan bahwa pengalaman seseorang yang berada di persimpangan beberapa identitas sekaligus tidak bisa dipahami secara terpisah-pisah, karena baik penindasan maupun ruang untuk melawan justru muncul dari gabungan identitas itu sendiri. Posisi Nyai Ontosoroh sebagai perempuan, pribumi, dan nyai tanpa status hukum, yang dalam konteks lain menjadi sumber penindasan berlapis, dalam

hal ini justru menjelaskan mengapa pencapaiannya disebut "lompatan historis", mengapa ia berani berdiri sejajar dengan kaum terpelajar kolonial, dan mengapa ia berani menjadi orang pertama yang menggugat lembaga hukum kolonial.

B. Dampak Negatif

Krisis identitas dan kekalahan di hadapan sistem yang memang sulit ditembus. Pengakuannya bahwa sosok Sanikem yang dulu semakin lama semakin hilang, serta pertanyaannya apakah ia sudah menjadi "wanita Belanda berkulit coklat" (h. 134), menunjukkan bahwa usahanya membangun diri dan melawan sistem kolonial justru membuatnya kehilangan akar identitas aslinya. Kehilangan ini bukan akibat musuh dari luar, melainkan akibat dari proses penyesuaian diri yang harus ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Pertanyaan itu juga menjadi kritik tersembunyi bahwa perempuan pribumi tidak akan pernah benar-benar diterima sepenuhnya, sejauh apa pun ia menguasai bahasa dan cara berpikir kolonial.

Krisis identitas ini berlanjut menjadi pengorbanan yang lebih besar ketika

ia memilih kembali menyandang status yang paling ia tolak sepanjang hidupnya, yakni status budak, demi melindungi Annelies (h. 139). Ini bukan tanda kelemahan, melainkan pilihan sadar, karena ia tahu sistem kolonial tidak menyediakan ruang aman bagi siapa pun di posisinya, sehingga satu-satunya hal yang bisa ia kendalikan hanyalah siapa yang menanggung beban itu. Keberaniannya berlanjut hingga ke ruang pengadilan, saat ia bertekad menjadi "Pribumi pertama yang melawan Pengadilan Putih" meski "tanpa ahli hukum" (h. 502), sebuah langkah yang pada akhirnya berujung kekalahan, karena lembaga yang ia hadapi memang tidak dirancang untuk bisa dikalahkan oleh orang seperti dirinya.

Jika dilihat secara keseluruhan, ketiga hal di atas menunjukkan bahwa beban yang ditanggung Nyai Ontosoroh terus bertambah, bukan berhenti di satu titik. Krisis identitas yang awalnya ia rasakan sendirian berkembang menjadi kesediaan menanggung penderitaan demi orang lain, lalu berlanjut menjadi keberanian menghadapi lembaga hukum yang ia tahu tidak akan memihaknya. Saputra (2011) menjelaskan bahwa kelompok

tertindas semacam ini tidak memiliki suara yang diakui oleh pihak yang berkuasa, sehingga pengorbanan apa pun yang mereka lakukan tidak otomatis mengubah sistem yang menindas mereka.

Krisis identitas dan kekalahan ini bukan menunjukkan kelemahan Nyai Ontosoroh, melainkan menjadi bentuk kritik terhadap sistem kolonial itu sendiri. Kolonialisme menghukum mereka yang berani melawan dengan cara yang halus, bukan dengan memenjarakan secara fisik, melainkan dengan menempatkan mereka pada posisi yang tidak lagi memiliki tempat untuk pulang secara budaya, sekaligus memastikan bahwa pengorbanan demi pengorbanan yang mereka berikan tidak cukup untuk mengubah hasil akhirnya.

E. Kesimpulan

Perempuan pribumi pada periode 1890-1910 mengalami penindasan yang bersifat interseksional, di mana posisi sebagai perempuan, sebagai pribumi, dan nyai saling berpotongan dan saling memperkuat, sehingga menghasilkan kerentanan berlapis yang tidak dapat dijelaskan oleh satu sumbu identitas saja. Realitas historis ini, mulai dari

pingitan dan keterbatasan akses pendidikan, institusi nyai yang menempatkan perempuan pribumi tanpa perlindungan hukum, hingga ketimpangan upah dan kemiskinan janda, tergambar secara konkret dalam novel *Bumi Manusia* melalui tokoh Nyai Ontosoroh.

Kritik sosial dalam novel ini beroperasi pada dua ranah besar yang saling mengunci. Pertama, kritik terhadap kolonialisme yang ditampilkan melalui eksploitasi tubuh perempuan pribumi lewat institusi nyai, penghapusan subjektivitas hukumnya berdasarkan ras, serta rasisme yang telah meresap ke dalam relasi sosial sehari-hari. Kedua, kritik terhadap patriarki yang tampak melalui domestikasi dan pembungkaman suara perempuan, komodifikasi perempuan sebagai objek transaksi antarlaki-laki, serta pewarisan penindasan antargenerasi yang membuat sistem ini bertahan tanpa perlu dipaksakan dari luar. Kedua sistem kolonialisme dan patriarki, tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan saling menopang dalam menutup ruang pembelaan bagi perempuan pribumi, baik di ranah domestik maupun di ranah hukum publik.

Perlawanan yang dilakukan Nyai Ontosoroh menghasilkan dampak yang saling bertentangan. Perlawanannya berhasil meruntuhkan sebagian prasangka kolonial tentang kapasitas perempuan pribumi dan menunjukkan keberanian menantang institusi hukum tertinggi kolonial, sehingga keberadaannya sendiri menjadi bentuk kritik aktif terhadap struktur sosial yang menindas. Dampak perlawanan tersebut juga membawa konsekuensi berupa krisis identitas, pengorbanan pribadi, dan kekalahan di hadapan sistem yang sejak awal dirancang agar tidak dapat ditembus dari dalam. Novel *Bumi Manusia* melalui tokoh Nyai Ontosoroh menegaskan bahwa keberanian individu, betapa pun besarnya, tidak cukup untuk meruntuhkan sistem kolonial-patriarkal secara struktural, namun tetap berhasil membuka ruang kesadaran dan resistensi yang menjadi fondasi penting bagi perjuangan perempuan pribumi pada masa berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajizah, L. W., Fitriany, A., & Widodo, J. P. (2021). *Peran wanita dalam eksistensi budaya Jawa pada masa Orde Baru* [Artikel tidak

- dipublikasikan]. STKIP PGRI Sidoarjo. and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.
- Amanda, S. T., & Lubis, F. H. (2022). Makna simbolik nilai feminisme tokoh Nyai Ontosoroh dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. *KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administratif Publik*, 1(1), 46–63.
- Aprilia, V., Silalahi, R. B., Halizah, N., & Ivanna, J. (2023). Perspektif masyarakat tentang budaya patriarki terhadap kesetaraan gender di kota medan. *INOVASI: Jurnal Ilmiah Pengembangan Pendidikan*, 1(3), 34-43.
- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku diskriminatif pada perempuan akibat kuatnya budaya patriarki di indonesia ditinjau dari perspektif konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1-13.)
- Arwansyah, Y. W., & Saputra, H. S. P. (2021). Analisis tokoh Nyai Ontosoroh dalam novel Bumi Manusia: Perspektif feminisme. *Jurnal Kajian Sastra*, 10(2), 113–128.
- Budianta, M. (2018). R.A. Kartini dan feminisme poskolonial Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 23(3), 87–101.
- Carey, P., & Noor, F. A. (2022). *Ras, Kuasa, dan Kekerasan Kolonial di Hindia Belanda*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative,* and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.
- Fairuz. (2025). Dekolonisasi citra Nyai: Representasi perempuan dalam sistem kolonial dan feodal Hindia Belanda pada tokoh Nyai Ontosoroh. *Pujangga*, 11(2), 144–152.
<https://doi.org/10.47313/pujangga.v11i2.4334>
- Handayani, T. (2021). Subordinasi Nyai Ontosoroh dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. *Jurnal Lingua*, 18(1), 21–35.
- Hendriwani, S. (2020). *Teori kelas sosial dan Marxisme Karl Marx. Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, 2 (1), 13–28.
- Herawati, N., Pertiwi, R., & Saputri, D. (2023). Eksploitasi perempuan pribumi dalam sistem ekonomi kolonial: Kajian atas novel Bumi Manusia. *Jurnal Sosiologi Sastra*, 7(2), 55–74.
- Ilma, A. A. (2016). Representasi penindasan ganda dalam novel Mirah dari Banda: Perspektif feminisme poskolonial. *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra*, 4(1), 3–9.
<https://doi.org/10.22146/poetika.v4i1.13310>
- Israpil, I. (2017). Budaya patriarki dan kekerasan terhadap perempuan (sejarah dan perkembangannya). *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan*, 5(2), 141–150.
<https://doi.org/10.31969/PUSAKA.V5I2.176>

- Karima, E. M. (2017). Kehidupan Nyai dan Pergundikan di Jawa Barat Tahun 1900-1942. *Diakronika*, 17(1), 1-16.
- Kaymaz, T., & Unsal, N. (2022). Postcolonial feminism and the intersection of colonialism and patriarchy in Southeast Asian literature. *Journal of Postcolonial Studies*, 15(3), 201–219.
- Kurniawan, H. (2014). Nyai dalam Pergundikan: Pendorong Munculnya Kaum Indo di Hindia Belanda. *Jurnal Historia Vitae*, 28(2), 136-153.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muniroh, S., Haryati, N., & Kurniawan, B. (2023). Institusi nyai sebagai subjek hukum yang ambigu dalam sistem kolonial Hindia Belanda. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(1), 33–50.
- Mustaqim, A. H. (2018). Ketertindasan dan perlawanan perempuan interseksionalitas dalam cerpen "Pohon Api" karya Oka Rusmini. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 14(2), 71–83.
- Saputra, A. D. (2011). Perempuan subaltern dalam karya sastra Indonesia poskolonial. *LITERASI: Indonesian Journal of Humanities*, 1(1), 16–30.
- Setiowati, L. (2024). *Minke dan Nyai Ontosoroh sebagai subjek antikolonial dan upaya-upaya perlawanannya dalam tetralogi Pulau Buru Pramoedya Ananta Toer* [Skripsi, Universitas Airlangga].
- Toer, P. A. (2018). *Bumi Manusia*. Lentera Dipantara.
- Wulandari, R., & Pratiwi, D. (2021). Diskriminasi ganda perempuan pribumi pada masa kolonial: Tinjauan historis. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 4(2), 78–95.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan* (edisi ke-2). Yayasan Pustaka Obor Indonesia